

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang (Studi Kasus pada Kantor BPKD Kabupaten Lumajang)

Uswatun Hasanah Mufahharoh^{1*}, Moh. Amin², Afifudin³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : uswatunlmj1@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of human resource competence, the application of government accounting standards, and the application of regional financial accounting systems on the quality of local government financial reports in Lumajang Regency. The number of samples used in this study were 45 respondents with a purposive sampling method. Data collection was carried out by distributing questionnaires to all BPKD employees in Lumajang Regency and processed using SPSS Statistics 24.0. The results of this study indicate that the competence of human resources and the implementation of the regional financial accounting system have no effect on the quality of the financial reports of the regional government of Lumajang Regency. While the application of government accounting standards has a positive effect on the quality of the financial reports of the regional government of Lumajang district.

Keywords: *Competence of human resources, government accounting standards, regional financial accounting systems, and quality of regional financial reports*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (PSAP, 2010). Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak memberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2013:18). Hal ini sesuai dengan pernyataan *Governmental Accounting Standar Board* dalam *Concepts Statements No. 1* tentang *Objectives of Financial Report* yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Atas dasar tersebut maka pemerintah menyusun laporan keuangan yang biasa disebut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahannya yang telah dilimpahkan sesuai dengan asas otonomi daerah. LKPD bertujuan untuk memberikan informasi keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat atau mempunyai nilai bagi para pemakai.

Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai dan juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut. Kebermanfaatan (*usefulness*) merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dan

hubungannya dengan keputusan, pemakai, dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Oleh karena itu, kriteria ini secara umum disebut karakteristik kualitatif atau kualitas informasi. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk nilai kualitas informasi laporan keuangan sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Sistem Akuntansi Pemerintah terdiri dari relevan (memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, lengkap), andal (penyajian jujur, dapat diverifikasi, netralitas), dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Informasi laporan keuangan yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Sebaliknya, informasi laporan keuangan yang tidak berkualitas akan memberikan peluang adanya kekeliruan dan kecurangan di bidang keuangan yang dapat menimbulkan tuntutan hukum. Jika penyimpangan terjadi terus-menerus akan menimbulkan kerugian keuangan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah seharusnya memperhatikan dan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan regulasi (Haliah, 2013:1).

Pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. Salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang transparan, dan akuntabel. Laporan keuangan tersebut setidaknya-tidaknya berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang. Laporan keuangan berkualitas dapat dilihat dari opini dari Badan Pemeriksa Keuangan, dimana dari opini tersebut ada strata penilaian laporan keuangan. Hasil audit berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan strata tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kemudian selanjutnya adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Selain opini dari Badan Pemeriksa Keuangan, Kualitas Laporan Keuangan dapat dilihat juga apabila telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), disusun melalui sistem akuntansi pemerintah daerah, informasi keuangan tidak terdapat penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, dan disajikan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pujanira (2017) bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Liza 2014) bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Rumusan Masalah

Apakah pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008) pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan dan Ketepatan waktu Pelaporan Keuangan Permintah Daerah. Hasil Penelitian menemukan bukti empiris kapasitas sumber daya manusia di Kota Palembang dan Ogan ilir tidak berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustiawan (2010) Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten Gorontalo Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Adhitama (2012) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan Kompetensi Sumber daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi, sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Yosefrinaldi (2013) Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian dengan menggunakan variabel intervening sistem pengendalian intern pemerintah, dengan jumlah responden 95 orang pada DPKAD se-Sumatera Barat yang hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Liza (2014) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hasil penelitian menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2015) Pengaruh Kapasitas sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Latifah (2017) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah. Hasil penelitian menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah sedangkan pengaruh penerapan standar akuntansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Pujanira (2019) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi dan Penerapan Sistem Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi DIY. Hal ini dibuktikan dengan persamaan regresi linier berganda.

Tinjauan Teori

1. Agency Theory

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Haryanto et al, dalam Rosalin (2011) akuntabilitas publik diartikan dengan adanya kewajiban pihak pemegang wewenang (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban dalam menyajikan, mengungkapkan, dan melaporkan segala kegiatan dan aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya terhadap pihak pemberi wewenang (*principal*) yang memiliki kewenangan dan hak untuk meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan wewenang tersebut.

Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan seluruh kegiatan dan aktivitas oleh pihak pemegang wewenang (*agent*) kepada pihak pemberi wewenang (*principal*) yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu pertanggungjawaban terhadap dana yang telah dikelola kepada lembaga yang tingkatannya lebih tinggi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan adalah teori yang dibuat berdasarkan suatu atau lebih kontrak dimana agen memberikan layanan tertentu kepada mereka dengan mendeliasikan kekuasaan pengambilan keputusan kepada agen. Berdasarkan teori ini, hubungan antara pemilik dan manajer pada dasarnya sulit tercipta, karena adanya kepentingan yang bertentangan.

2. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia (2012) dalam Standar Akuntansi Keuangan, menyatakan bahwa setiap laporan keuangan yang disusun merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap. Pelaporan keuangan yang lengkap biasanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan catatan laporan keuangan serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Semua laporan keuangan tersebut merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan atau entitas tertentu dalam suatu periode akuntansi tertentu yang biasanya digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan kinerja sebuah entitas atau perusahaan tersebut.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Dalam sebuah lembaga pemerintah dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial.

Menurut Rahmadani (2015) tujuan umum suatu laporan keuangan khususnya pada laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan sebuah informasi mengenai posisi keuangan realisasi anggaran, dan kinerja suatu entitas dalam proses pelaporan yang dapat digunakan oleh semua pengguna dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

3. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan bagi penggunanya, baik internal maupun eksternal dalam periode tertentu. Tujuan laporan keuangan menurut Muhandi (2013:1) “tujuannya adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan dalam posisi keuangan sebagai suatu entitas yang bermanfaat dalam pembuatan skema.”

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 1 paragraf 9 menyatakan bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan (a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah: (b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah: (c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi: (d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya: (e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan menandai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya: (f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan: (g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam menandai aktivitasnya. Laporan keuangan memainkan peran penting untuk memenuhi kewajiban pemerintah kepada publiknya dalam masyarakat yang demokratis.

4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Marliani dkk (2018) Penyusunan dan penyajian LKPD dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah. LKPD disajikan dengan dilampiri ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah. Selanjutnya LKPD disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan. LKPD yang telah diaudit BPK, selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Suatu laporan keuangan dapat dikatakan bermanfaat bagi para pemakainya jika laporan keuangan tersebut mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang berkualitas tentunya memiliki kriteria tersendiri. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut bersifat relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

5. Komponen Laporan Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 paragraf 14 menyatakan bahwa Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi hal-hal berikut ini :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas

6. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi menurut Spencer and Spencer, (1993:9) : *“an underlying characteristic’s of an individual which is casually related to criterion- referenced effective and or superior performance in a job or situation”*. Penulis menterjemahkan, “suatu karakteristik yang mendasari kepribadian seseorang yang menyebabkan saling berkaitan dengan kriteria-keperilakuan efektif dan atau kinerja yang unggul dalam pekerjaan atau situasi tertentu”.

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk

melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau terutang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang ditanyakan dalam pelaksanaan tugas.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Menurut Brigham dan Houston (2006) bahwa nilai perusahaan sangat penting, sebab dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Semakin tinggi harga saham, maka nilai perusahaan semakin tinggi pula. Nilai perusahaan yang tinggi merupakan keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan tingginya nilai perusahaan menunjukkan tingginya kemakmuran para pemegang saham. Kekayaan perusahaan dan pemegang saham dapat dilihat dari harga pasar saham, yang mencerminkan keputusan investasi, keuangan, dan manajemen aset.

7. Penerapan Standar Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah diterapkan dilingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintahan daerah, dan satuan organisasi dilingkungan pemerintahan pusat atau daerah jika menurut undang-undang satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Kegunaan dari Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menyatakan Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan di Indonesia.

8. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Erlina Rasdianto (2013) mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Sedangkan, menurut Abdul Halim (2007:43) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi,

kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut Halim, (2012;35) akuntansi keuangan daerah dapat di definisikan sebagai berikut :

“suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”.

Mengutip dari Kepmendagri No 29 Tahun 2002 pasal 70 ayat (1)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

Sistem Akuntansi yang digunakan pada akuntansi pemerintah daerah adalah sistem desentralisasi. Menurut Rondinelli dalam Cheema dan Rondinelli (1983) mendefinisikan desentralisasi sebagai perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah, manajemen, dan pengambil keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah (Bastian : 2006)

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang dengan waktu penelitian dimulai pada bulan Februari 2023 sampai Maret 2023.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang ada di Kabupaten Lumajang.

Definisi Operasional Variabel

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai manusia yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Kompetensi menurut *Guy et al.* (2002) adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.

Item-item yang disesuaikan dengan konteks pemerintah daerah. Jumlah item pertanyaan adalah 7 item. Variabel kompetensi sumber daya manusia diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Xu, *at al.* (2003) yaitu :

1. Pemahaman tentang akuntansi
2. SDM yang berkualitas
3. Sumber daya yang memadai
4. Peran dan tanggung jawab
5. Pelatihan keahlian dalam tugas
6. Sosialisasi peraturan baru
7. Pemahaman tentang struktur organisasi

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Penerapan standar akuntansi pemerintah mengacu pada tingkat pengelola keuangan sesuai dengan tugas fungsi dan tanggungjawab yang disertai dengan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan.

Jumlah item pertanyaan adalah 10 item. Variabel penerapan standar akuntansi pemerintah diukur dengan indikator yaitu :

1. Pencatatan asset didukung dengan bukti-bukti sesuai ketentuan
2. Pencatatan utang didukung dengan bukti-bukti sesuai ketentuan
3. Modal telah didukung dengan bukti-bukti sesuai ketentuan
4. Laporan realisasi anggaran telah didukung dengan bukti-bukti sesuai ketentuan
5. Pengelolaan keuangan telah sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggungjawab
6. Pengelola keuangan telah memahami laporan keuangan sesuai ketentuan
7. Pengelola keuangan berlatar belakang pendidikan akuntansi
8. Sarana/prasarana didalam pengelolaan keuangan yang dimiliki telah memadai
9. Informasi disajikan dengan jujur dan dengan terbuka
10. Anggaran pemerintah dapat memenuhi seluruh kebutuhan anggaran

3. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI (2001:1), Sistem akuntansi keuangan secara sederhana adalah suatu sistem informasi yang menggabungkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan data yang berkaitan dengan keuangan dari suatu entitas sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Jumlah item pertanyaan adalah 8 item. Variabel penerapan sistem akuntansi keuangan diukur dengan indikator yaitu :

1. Kesesuaian sistem dengan SAP
2. Pengidentifikasian transaksi
3. Pencatatan transaksi
4. Bukti disetiap transaksi
5. Pencatatan kronologis
6. Pengklasifikasian transaksi
7. Laporan keuangan setiap periode
8. Pelaporan yang konsisten dan periodic

4. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah ukuran – ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam laporan normatif yang perlu diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP 71 Tahun 2010). Pengukuran variabel ini diukur dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.

Adapun Indikator Kualitas Laporan Keuangan menurut Erlina Rasdianto (2013) adalah:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi mengenai variabel-variabel penelitian Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistic					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Sumber Daya Manusia	45	1	5	4	0,117
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	45	1	5	4	0,078
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	45	1	5	4	0,083
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	45	1	5	4	0,067
Valid N (listwise)	45				

Sumber: Data SPSS Versi 24

Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Hasil uji validitas dapat dikatakan valid apabila diketahui r-tabel dengan jumlah $n = 45$ adalah $df = 45 - 2 = 43$ maka $r\text{-tabel} = 0,294$. Dapat dikatakan valid apabila nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel. Dan uji validitas diatas memiliki nilai R hitung $> R$ tabel sebesar 0,294 yang artinya keseluruhan item pertanyaan bersifat valid.

b. Uji Reliabilitas

Hasil uji reabilitas dimana hasil uji tersebut diketahui nilai Cronbach alpha variabel Kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,917, 0,916, 0,950, 0,922 $> 0,8$ yang artinya dapat dikatakan reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

Unstandardized		
Residual		
N		45
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	504.338.911
Most Extreme Differences	Absolute	.113
	Positive	.113
	Negative	-.081
Test Statistic		.113
Asymp. Sig. (2-tailed)		.188 ^c

Sumber: Data SPSS Versi 24

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat disimpulkan hasil dari uji normalitas memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga masing-masing variabel dinyatakan berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolineritas

Tabel 3 Hasil Uji Multikolineritas

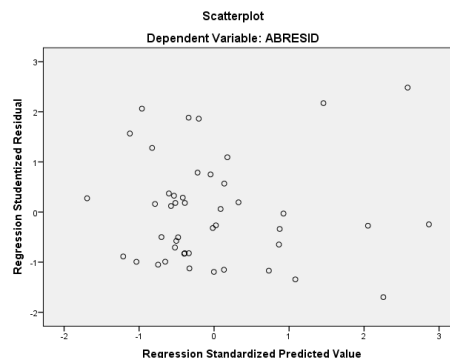
Collinearity Statistics			
Model		Tolerance	VIF
1	Kompetensi Sumber Daya Manusia	.349	2.867
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	.337	2.964
	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	.690	1.450

Sumber: Data SPSS Versi 24

Berdasarkan hasil tabel 3 diatas dapat disimpulkan hasil uji multikolineritas tidak terjadi multikolineritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel karena nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,1.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data SPSS versi 24

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau bebas heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini. Hal itu dapat diketahui bahwa pada grafik plot menunjukkan titik-titik yang menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

Analisis Linier Berganda

Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficient Beta	t	Sig
Modal	B	Sts. Error			
1 (Constant)	31.114	7.256		4.288	.000
Kompetensi Sumber Daya Manusia	-.084	.141	-.115	-.594	.558
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	.703	.197	.701	3.567	.001
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	.703	.085	.118	.858	.396

Sumber: Data SPSS versi 24

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 31,114, Nilai koefisien regresi variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,084, nilai koefisien regresi penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar 0,703, dan nilai koefisien regresi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,703.

Uji Hipotesis

Uji F (Simultan)

Tabel 5 Hasil Uji F

Modal	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig
1 Regression	31.114	3	324.675	11.894	.000 ^b
Residual	1.119.174	41	27.297		
Total	.703	44			

Sumber: Data SPSS versi 24

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai F signifikan sebesar 0,000. Dari hasil tersebut dapat diketahui nilai F signifikan $0,000 < (\alpha)$ tingkat alfa 5% maka dapat dikatakan bahwa

model regresi memiliki tingkat kesesuaian model yang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6 Hasil Uji R Square

Modal	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.682 ^a	.465	.426	5.225

Sumber: Data SPSS versi 24

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,426 atau 42,6% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten lumajang dipengaruhi oleh faktor kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, sedangkan sisanya sebesar 57,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji t (Parsial)

Tabel 7 Hasil Uji t (Parsial)

Unstandardized Coefficients			Standardized Coeffien Beta	t	Sig	Keterangan
Modal	B	Sts. Error				
1 (Constant)	31.114	7.256		4.288	.000	
Kompetensi Sumber Daya Manusia	-.084	.141	-.115	-.594	.558	Ditolak
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	.703	.197	.701	3.567	.001	Diterima
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	.703	.085	.118	.858	.396	Ditolak

Sumber: Data SPSS versi 24

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai 0,594 yang artinya tidak berpengaruh, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memiliki nilai 3.567 yang artinya berpengaruh positif, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai 0,858 yang artinya tidak berpengaruh.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan output SPSS, Hasil penelitian ini adalah tidak adanya pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang menunjukkan bahwa kondisi sumber daya manusia pada bagian pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Lumajang belum mencukupi dan belum memenuhi peraturan penulisan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria standar akuntansi. Beberapa pegawai di BPKD Lumajang bagian pengelolaan keuangan hanya memiliki tingkat pendidikan sarjana sebesar 67%, namun sebagian besar sumber daya manusia pada bagian pengelolaan keuangan tidak memiliki latar belakang akuntansi sebesar 44%, untuk yang memiliki latar belakang manajemen sebesar 16%, dan yang memiliki latar belakang akuntansi sebesar 40%. Sumber daya manusia yang ada di dalam BPKD Kabupaten Lumajang juga masih belum menerapkan pemisahan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh manajemen dengan sabaik-baiknya, sehingga masih dapat terjadinya penggandaan tugas yang dilakukan antara karyawan satu dengan yang lain. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh indriasari (2008) dapat dilihat pada regresi linier sederhana yang

mengatakan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan output SPSS dari hasil penelitian Hasil hipotesis kedua menyatakan bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terbukti hasil regresi menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah dengan signifikan 0,001 (lihat tabel 4.15). nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari nilai kepercayaan (α) 0,05 sehingga hipotesis (H_0) ditolak dan (H_a) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah akan berpengaruh meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

3. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan output SPSS dari Hasil uji t menunjukkan nilai sebesar 0,118 dan nilai signifikasinya sebesar 0,396 > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak.

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang lemah akan menyebabkan kualitas informasi akuntansi keuangan yang akan dihasilkan kurang relevan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Berdasarkan penelitian ini pada Kabupaten Lumajang menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. hal ini kemungkinan terjadi karena sistem akuntansi keuangan daerah yang digunakan belum optimal , dalam hal proses pencatatan yang belum sepenuhnya dicatat berdasarkan kronologisnya yang sesungguhnya. Hal tersebut dapat mengakibatkan sistem akuntansi keuangan yang dilakukan kurang optimal untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka peneliti menyimpulkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh Negatif dan Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data penelitian ini merupakan data primer yang berasal dari responden dengan menggunakan kuesioner dalam pengambilan jawaban dari responden. Sehingga, peneliti tidak bisa mengawasi secara langsung atas pengisian jawaban. Yang mana persepsi responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
2. Peneliti memiliki hambatan pada terbatasnya jumlah responden. Hal ini disebabkan pegawai yang berada di BPKD tidak seluruhnya berada di tempat penelitian karena adanya penugasan ke luar. Sehingga peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan kuesioner yang dibutuhkan.
3. Penelitian ini bersifat homogen, yang mana peneliti ini spesifik dilakukan hanya pada pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memilih kuesioner yang dapat dipahami oleh responden, dan saat pembagian kuesioner harap dijelaskan terlebih dahulu agar mendapatkan hasil yang lebih baik.
2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan metode lain selain kuesioner, seperti wawancara sehingga mendapatkan informasi yang lebih akurat dari setiap responden.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan misalnya variabel pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustriawan, Vicky. (2010). *“Pengaruh Pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten”* Gorontalo Utara. Skripsi Universitas Negeri Gorontalo.
- Adhitama, Surya. 2012. *“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”* (studi kasus pada Kabupaten Ogan Ilir). Artikel Ilmiah Universitas Negeri Padang.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- Dewi. 2015. *“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lawang Sumatera Selatan”* *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*.
- Ghozali, Imam. (2007). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Haliah, 2012, *“Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”*, Disertai Doktor pada FPS UNHAS Makassar.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Indriasari. 2008. *“Pengaruh kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”* Studi Kasus pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir”. *Jurnal Akuntansi*.
- Kuncoro, Mudjarat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 pasal 70 ayat (1) tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
- Latifa, 2017 *“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah”* (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Bantul) Skripsi Universitas PGRI Yogyakarta
- Liza, 2014. *“Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan”*. *JOM FEKOM Vol. 1 Nomor 2 Oktober 2014*.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen kinerja sektor public*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2014. *“ Sistem Informasi Akuntansi “*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marliani, Meli. 2018. *“Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”*. *E-JRA Vol. 07 No. 10 Agustus 2018*.

- Muhardi, Werner R, 2013. *Analisis Laporan Keuangan, Proyeksi dan Valuasi saham*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 1 Paragraf 9. Penyajian dan Tujuan umum Laporan Keuangan.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 1 Paragraf 9. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
- Pujanira, Putriasri. 2017. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY”. *Jurnal Nominal/ Volume VI Nomor 2/ Tahun 2017*.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2014. *Metode penelitian manajemen*. Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang N0. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Yosefrinaldi, 2013. “*Pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern pemerintah*” (*Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat*). Skripsi Universitas Negeri Padang, Padang.